



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**TAHUN
2025**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memiliki arti strategis karena menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan semester pertama (Januari-Juni) tahun 2025 dan juga memuat rencana kerja dan pendanaan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2027.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam semester kedua (Juli-Desember) tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.

Larantuka, Agustus 2025

f Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur, *[Signature]*



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pemula Utama Muda
NIP. 19651021199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	7
2.1. Evaluasi RENJA Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	7
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu – isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Perangkat Daerah	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	
	Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	8
Tabel II.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
	Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	22
Tabel III.1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	
	Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.....	26



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; serta (b) keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan untuk memenuhi ketentuan Pasal 343 ayat (1), Pasal 346 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0199);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan Daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program dan subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - b. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. perumusan program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan memperhatikan visi, misi dan program kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II evaluasi hasil pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2025;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyempurnaan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) PD wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan melakukan Perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2025 maka yang digunakan adalah Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPERIDA untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Kepala BAPPERIDA menelaah kesesuaian antara Perubahan Renja PD Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan menggunakan evaluasi Perubahan Renja PD Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

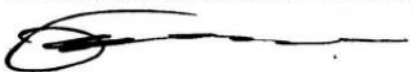
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Flores Timur merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan barang/kekayaan milik daerah;
- d. Melakukan pengujian, penilaian dan evaluasi atas laporan setiap instansi di daerah;
- e. Melakukan pengusutan tentang kebenaran laporan pengaduan, penyimpangan dan penyalahgunaan;
- f. Melakukan analisis dan menyusun laporan serta melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pengawasan; dan
- g. melakukan kegiatan administrasi lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan Dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

16. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0199);
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023– 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 Nomor 18);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II / semester pertama Tahun 2025; yang berkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan tahun 2025.
- b. Menjabarkan perubahan indikator kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan
- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2026.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan dengan memperhatikan dokumen Renstra 2023 – 2026 sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mulai tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2023-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya berbagai kendala eksternal maupun internal dalam pelaksanaan pengawasan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel II.1. berikut:

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I	II	III	IV						
1					3	4	5		6		7		8		9		5 = 6 + 7 + 8 + 9	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01				INSPEKTORAT DAERAH		270	7.885.152.000	52	1.055.006.968	59	1.207.576.782	0	-	0	-	112	2.262.583.750
6	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		156	7.211.152.000	28	1.015.766.968	38	1.082.917.682	0	-	0	-	67	2.098.684.650
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	255.200.000	17	28.257.280	20	40.521.370	0	-	0	-	37	68.778.650
						Persetanse Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.117.500.000	4	9.160.532	4	5.117.000	0	-	0	-	8	14.277.532
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100	90.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	4.748.452.000	7	978.349.156	15	1.037.279.312	0	-	0	-	22	2.015.628.468

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				I	II	III	IV							
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	01		Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15	55.000.000	4	440.000	5	20.784.000	0	-	0	-	9	21.224.000
6	01	01	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	20.000.000	-	-	1	4.973.400	0	-	0	-	1	4.973.400
6	01	01	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	10.000.000	-	-	1	3.565.600	0	-	0	-	1	3.565.600
6	01	01	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	6 Laporan	15.000.000	4	440.000	2	9.107.000	-	-	0	-	6	9.547.000
6	01	01	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	10.000.000	-	-	1	3.138.000	0	-	0	-	1	3.138.000

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I	II	III		IV					
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	26	4.693.452.000	3	977.909.156	10	1.016.495.312	0	-	0	-	13	1.994.404.468
6	01	01	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	44/14 Org/Bln	4.614.852.000	3	977.909.156	4	996.695.312	0	-	0	-	7	1.974.604.468
6	01	01	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	78.600.000	-	-	6	19.800.000	0	-	0	-	6	19.800.000
6	01	01	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD (Laporan)	4	19.000.000	1	440.000	1	3.283.000	0	-	0	-	2	3.723.000
6	01	01	03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I		II		III		IV			
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	10.000.000	1	440.000	0	-	-	-	0	-	1	440.000
6	01	01	03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	4.000.000	-	-	1	3.283.000	0	-	0	-	1	3.283.000
6	01	01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP (%)	9	103.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	01	01	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2 Dokumen	8.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	01	01	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2 Orang	70.000.000	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				I		II		III		IV				
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (orang)	1 Orang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Disediakan (unit)	43	131.800.000	10	18.961.000	7,52	18.261.700	0	-	0	-	18	37.222.700
6	01	01	05	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	2.000.000	3,5	7.034.600	0,1	113.500	0,00	-	0	-	4	7.148.100
6	01	01	05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	6.500.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
6	01	01	05	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	5.000.000	0,1	635.000	0,2	786.000	-	-	0	-	0,3	1.421.000
6	01	01	05	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantoryang Disediakan (Paket)	4 Paket	18.500.000	0,5	2.516.000	1,2	5.350.000	0,00	-	0	-	2	7.866.000
6	01	01	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	21.000.000	0,1	2.060.400	0,2	3.235.000,00	0,00	-	0	-	0,3	5.295.400

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I		II		III		IV			
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan (Paket)	12 Dokumen	2.000.000	3	150.000	0	-	0	-	0	-	3	150.000
6	01	01	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	16.800.000	3	6.565.000	3	2.650.000	-	-	-	-	6	9.215.000
6	01	01	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10 Laporan	55.000.000	-	-	3	6.127.200	0	-	0	-	3	6.127.200
6	01	01	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan (Unit)	5	2.067.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	01	01	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I		II		III		IV			
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	01	01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	36	91.400.000	6	8.856.280	11	18.976.670	0	-	0	-	17	27.832.950
6	01	01	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	1.200.000	3	650.000	3	254.500	0	-	0	-	6	904.500
6	01	01	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	35.000.000	3	8.206.280	3	7.222.170	0	-	0	-	6	15.428.450

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I	II	III		IV					
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	55.200.000	0	-	5	11.500.000	0	-	0	-	5	11.500.000
6	01	01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (unit)	18	50.000.000	4	9.160.532	4	5.117.000	0	-	0	-	8	14.277.532
6	01	01	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15 Unit	20.000.000	3	3.860.532	4	5.117.000	0	-	0	-	7	8.977.532
6	01	01	09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	10.000.000	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-
6	01	01	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	10.000.000	1	5.300.000	0	-	-	-	0	-	1	5.300.000
6	01	01	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	10.000.000	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I		II		III		IV			
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan		73	544.000.000	23	37.290.000	20	122.881.900	0	-	0	-	43	160.171.900
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut LHP (%)	77,00	35.000.000	6	3.240.000	3	2.120.000	0	-	0	-	9	5.360.000
6	01	02	01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal (Laporan)	62	287.000.000	18	23.430.000	16	76.354.400	0	-	0	-	34	99.784.400
6	01	02	01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	13 Laporan	80.000.000	3	9.070.000	5	12.120.000	0	-	0	-	8	21.190.000
6	01	02	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	7 Laporan	60.000.000	9	11.120.000	1	44.388.400	0	-	0	-	10	55.508.400
6	01	02	01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	5 Laporan	25.000.000	-	-	5	10.436.000	0	-	0	-	5	10.436.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				I	II	III	IV							
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	02	01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5 Laporan	20.000.000	-	-	2	6.540.000	0	-	0	-	2	6.540.000
6	01	02	01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	16 Laporan	67.000.000	-	-		750.000	0	-	0	-	0	750.000
6	01	02	01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	16 Dokumen	35.000.000	6	3.240.000	3	2.120.000	0	-	0	-	9	5.360.000
6	01	02	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	11	257.000.000	5	13.860.000	4	46.527.500	0	-	0	-	9	60.387.500
6	01	02	02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah (Laporan)	2 Laporan	77.000.000	2	2.120.000	0	1.320.000	-	-	0	-	2	3.440.000
6	01	02	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	9 Laporan	180.000.000	3	11.740.000	4	45.207.500	0	-	0	-	7	56.947.500

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I		II		III		IV			
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		41	130.000.000	1	1.950.000	1	1.777.200	0	-	0	-	2	3.727.200,00
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	50	75.000.000	1	1.950.000	1	1.777.200	0	-	0	-	2	3.727.200,00
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	1	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	01	03	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025 yang di Evaluasi	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					I		II		III		IV			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 6 + 7 + 8	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	03	01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3 Rekomendasi	20.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
6	01	03	02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	38	110.000.000	1	1.950.000	1	1.777.200	0	-	0	-	2	3.727.200
6	01	03	02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	11 Perangkat Daerah	35.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	01	03	02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	11 Perangkat Daerah	20.000.000	1	1.950.000	1	1.777.200	0	-	0	-	2	3.727.200
6	01	03	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	8 Kegiatan	35.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	01	03	02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	8 Perangkat Daerah	20.000.000	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-

Rencana Kerja (renja) Tahun 2025 memuat 3 program , 12 kegiatan dan 49 sub kegiatan serta pagu anggaran sebesar Rp.7.885.152.000. Realisasi capaian kinerja dan anggaran masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total dana sebesar Rp.7.211.943.673,-Realisasi anggaran mencapai Rp2.098.684.650,- (29,10%). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 36,45% .

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.544.000.000,-Realisasi anggaran mencapai Rp.160.171.900,-(29,44%). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 33,87%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.130.000.000,-Realisasi anggaran mencapai Rp.3.727.200 (2,87%). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 81,90%.

Dengan demikian capaian kinerja program sampai dengan triwulan II adalah sebesar 59,00% dengan realisasi anggaran sebesar 1.207.576.782,- (15,31%).

Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yang menjadi penghambat. Ada beberapa permasalahan dan solusi dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- a. Jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi ruang lingkup tanggungjawab pengawasan tidak sebanding dengan jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) ketersediaan sumber daya APIP yang ada.

Solusi yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan jumlah tenaga fungsional Pengawasan (Auditor maupun PPUPD), dan meningkatkan kapasitas tenaga fungsional melalui bimtek dan pelatihan teknis.

- b. Sarana dan prasarana serta fasilitas berupa gedung kantor dan peralatan kantor lainnya (laptop dan printer) yang kurang memadai.

Solusi yang ditempuh adalah :

- Melakukan renovasi ruangan yang ada untuk bisa digunakan.
- Mengusulkan pembangunan / pengadaan gedung kantor yang baru

- Merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table II.2 berikut ini.

Tabel II.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
I	Level Kapabilitas APIP		✓	3	3	4	4	3	-	4	4	
II	Maturitas SPIP		✓	2	2	3	4	2	-	3	4	
III	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan		✓	35.7	40.82	45.92	51.02	55.68	-	45.92	51.02	
IV	Tindak Lanjut LHP		✓	65.20	75.00	77.00	80.00	38.87	-	77.00	80.00	

Data pada tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 mencapai 3 dari target 3
2. Maturitas SPIP Tahun 2024 mencapai 2 dari target 2
3. Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 mencapai 55,68% dari target 40,82%
4. Tindak Lanjut LHP Tahun 2024 mencapai 38,87% dari target 75,00%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Flores Timur diantaranya :

- 1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengacu pada misi ke 5 untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan pada Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga mengacu kepada agenda Strategis Nasional Reformasi Birokrasi Aparatur Negara yaitu :

- a. Penataan kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah
 - b. Penyederhanaan ketatalaksanaan harus mendorong pelayanan terpadu, sistem, mekanisme dan prosedur.
 - c. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun, meliputi perencanaan kepegawaian yang menyangkut formasi, analisis jabatan, organisasi dan beban kerja, nomenklatur jabatan fungsional, standar kompetensi, kompetitif dan penempatan pegawai;
 - d. Mengembangkan SAKIP, peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan SAKIP, penentuan target dan indikator kinerja
 - e. Pelayanan publik, kelembagaan pelayanan satu atap yang menyangkut landasan hukum, kewenangan dan mekanisme
 - f. Pengembangan sistem pengawasan nasional secara berjenjang
 - g. Pengembangan budaya kerja aparatur negara dan pementapan karakter dan jatidiri aparat yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, profesional, netral, sejahtera, berkinerja produktif dan berakhlak mulia.
- 2) Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, antara lain dengan menetapkan Wilayah Bebas Korupsi pada SKPD

secara bertahap dan melaksanakan Pakta Integritas, Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi serta Kegiatan Saber Pungli pada Organisasi Perangkat Daerah dan pada Tempat – tempat Pelayanan Umum.

Upaya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi senantiasa terus dilakukan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Stranas PPK) dan sebagai implementasinya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun. Inspektorat juga melakukan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku lembaga pengawas internal pemerintah, berperan dalam mendorong upaya pencegahan pemberantasan korupsi dengan melakukan MONEV terhadap rencana aksi dimaksud. Selain itu Inspektorat sejak tahun 2023 mulai melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibagi menurut wilayah binaan 5 (Lima) Inspektur Pembantu.

1) Peningkatan Opini Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam hal Akuntabilitas Keuangan Daerah, menunjukkan kinerja sudah sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023,Tahun 2024 Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025

Belanja SKPD dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.6.629.560.254,- mengalami pengurangan (berkurang) sebesar Rp.1.255.591.746,- (15,92%) dari Rencana Kerja (Renja) Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.885.152.000,- terdiri dari :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dianggarkan sebesar Rp.5.639.943.673,- atau berkurang sebesar Rp.1.809.867.400,-(25,10%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.211.152.000,-
2. **Program Penyelenggaraan Pengawasan.** dianggarkan sebesar Rp.792.065.230,- atau bertambah sebesar Rp.27.200.000,-(5%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 544.000.000,-
3. **Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi** dianggarkan sebesar Rp.197.551.351,- atau bertambah sebesar Rp20.588.000,-(15,84%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.130.000.000,-

Alokasi anggaran belanja pada program 2 dan rogram 3 untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 terinci dalam Tabel III.1

Tabel III.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)
					INSPEKTORAT DAERAH			7.885.152.000			6.629.560.254		(1.255.591.746)
6	0	1			INSPEKTORAT DAERAH			7.885.152.000			6.629.560.254		(1.255.591.746)
6	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	7.211.152.000		100	5.639.943.673		(1.571.208.327)
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100			100			
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100			100			
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100			100			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	55.000.000		-	57.648.765		(2.6487.765)		
6	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	20.000.000,	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	17.118.774		(2.881.226)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	11.682.395		1.682.395	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	1	1	.	0		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	15.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	17.063.892		(2.063.892)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
				0											
				0											
				1											
6	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	1	1	.	0											
				0											
				1											
				7											
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	11.783.704		(1.783.704)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.693.452.000		-	5.191.520.236		498.068.236		
	1	1	.	0											
			2												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
1	1	1	.	0											
			2	1											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44/14	4.614.852.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57/14	5.145.920.236		531.068.236	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
1	1	1	.	0											
			2	2											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	78.600.0000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	45.600.000		(33.000.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	19.000.000		-	15.590.633		(3.409.367)		
6	0	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	5.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	3.951.980		(1.048.020)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	5.505.936		(4.494.064)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	6.132.717		2.132.717	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	103.000.000		-	64.723.399		(38.276.601)		
6	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
1	1	1	0	0											
			5	3		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	5.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	7.368.399		(2.368.399)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
1	1	1	0	0											
			5	5		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	8.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	4.475.000		(3.525.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
1	1	1	0	0											
			5	9		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	70.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	52.880.000		(17.120.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
	1	1	.	0											
			5	1											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Rp -		(20.000.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	131.800.000		-	186.214.013		54.414.013		
	1	1	.	0											
			6												
6	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	1	1	.	0											
			0	0											
			6	1											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	11.912.559		9.912.559	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	1	1	.	0											
			0	0											
			6	2											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	6.500.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	4.833.609		(1.666.391)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
1	1	1	.	0											
			0	0											
			6	3											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	4.626.998		(373.002)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
1	1	1	.	0											
			0	0											
			6	4											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	18.500.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	26.946.697		8.446.697	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
1	1	1	.	0											
			0	0											
			6	5											
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	21.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	13.499.779		(7.500.221)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
1	1	1	.	0											
			0	0											
			6	6											

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertamba/ (Berkuran) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
								Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	269.538		(1.730.462)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu										
	1	1	.	0												
			0	0												
			6	8												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	16.800.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	13.500.000		(3.300.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	1	1	.	0												
			0	0												
			6	9												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	55.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	110.624.833		55.624.833	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
	1	1	.	0												
			0	1												
			6	1												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	5.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	-		(5.000.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.067.500.000		-	13.574.872		(2.053.925.128)		
6	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	1	1	.	0		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	-		(35.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pengadaan Mebel										
	1	1	.	0		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	-		(7.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	1	1	.	0		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	15.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	13.574.872		(1.425.128)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas
				7											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
1	1	.	0	0											
		7	9												
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2.000.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	-		(2.000.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
1	1	.	0	0											
		7	0												
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	-		(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas
6	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	91.400.000		-	55.840.638		(35.559.362)		
1	1	.	0	8											
		8	1												
6	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
1	1	.	0	0											
		8	1												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.200.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	1.115.638		(84.362)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	Penunjang Prioritas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
6	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
1	1	1	.	0												
			0	0												
			8	2												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	40.925.000		(5.925.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas	
6	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
1	1	1	.	0												
			0	0												
			8	4												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	55.200.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	13.800.000		(41.400.000)	PAJAK RESTORAN	Penunjang Prioritas	
6	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.000.000		-	54.831.117		(4.831.117)			
1	1	1	.	0												
			0	9												
6	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
1	1	1	.	0												
			0	0												
			9	2												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13	41.513.628		21.513.628	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pemeliharaan Mebel										
	1	1	.	0											
			9	5											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	-		(10.000.000)	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	1	1	.	0											
			9	9											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	6.487.489		(3.512.511)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	1	1	.	0											
			9	0											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13	6.830.000		(3.170.000)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut LHP (%)	78,25	544.000.000		78,25	792.065.230		(284.065.230)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	287.000.000		-	367.587.392		(80.587.392)		
6	0	0	2	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13	80.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18	136.728.329		56.728.329	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah/ (Berkuran) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
								Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16	98.932.016		38.032.016	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2	0	0	Reviu Laporan Kinerja										
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7	51.334.037		26.334.037	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2	0	0	Reviu Laporan Keuangan										
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	25.641.679		(5.641.679)	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2	0	0	Pengawasan Desa										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16	67.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	36.425.550		(30.574.450)	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
1	2	.	0	0											
				1	7										
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17	19.425.781		(15.574.219)	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	257.000.000		-	424.477.838		(167.477.838)		
1	2	.	0	2											
6	0	0	2	0	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
1	2	.	0	0											
				2	1										
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	77.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	54.918.329		(22.081.671)	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0	2	0	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
1	2	.	0	0											
			2	2											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9	180.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	369.559.509		(189.559.509)	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	130.000.000		3	197.551.351		67.551.351		Penunjang Prioritas
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	50			15					
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	1			1					
6	0	0	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	20.000.000		-	13.906.440		(6.093.560)		
	1	3	.	0											
			1												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										
1	3	.	0	0											
			1	1		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	13.906.440		(6.093.560)	PAJAK PENERANGAN JALAN	Penunjang Prioritas
6	0	0	2		Pendampingan dan Asistensi	-	-	110.000.000		-	183.644.911		73.644.911		
1	3	.	0	2											
6	0	0	2	0	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
1	3	.	0	0											
			2	1		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	20.237.685		(14.762.315)	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										
1	3	.	0	0											
			2	2											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
							Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30	24.159.504		(4.159.504)	PAJAK PENERANG AN JALAN	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										
	1	3	.	0		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	106.409.288		71.409.288	PAJAK PENERANG AN JALAN	Penunjang Prioritas
6	0	0	2	0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
	1	3	.	0		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16	32.838.434		12.838.434	PAJAK PENERANG AN JALAN	Penunjang Prioritas

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2025, masih diperlukan kerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka memaksimalkan capaian program/kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Agustus 2025
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,

Antonius Lebi Raya, S/Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

